

**EFEKTIVITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN
2007 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BERDASARKAN *SIYĀSAH DUSTURIYĀH***

SKRIPSI

Oleh

Fajar Nur Rimantoro

NIM. 05020421039



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Siyasah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Nur Rimantoro
NIM : 05020421039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tatanegara (Siyasah)
Judul : Peran Penyidik PNS Satpol PP Kabupaten Lamongan dalam Penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Fajar Nur Rimantoro

NIM. 05020421039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

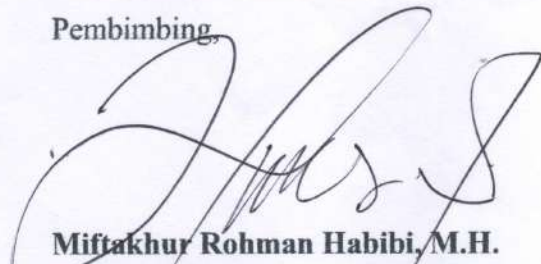
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fajar Nur Rimantoro
NIM : 05020421039
Judul : Peran Penyidik PNS Satpol PP Kabupaten Lamongan
dalam Penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk-diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Pembimbing,



Miftakhur Rohman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fajar Nur Rimantoro

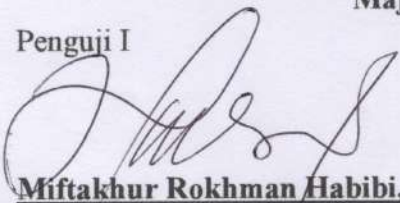
NIM. : 05020421039

Judul : Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam Penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun
2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan *Siyāṣah Dusturiyāh*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin,
tanggal 8 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

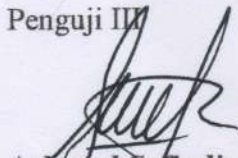
Penguji I



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

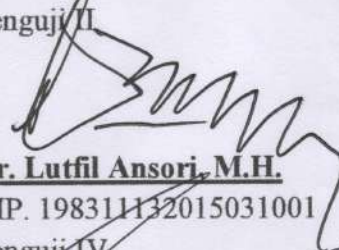
Penguji III



Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

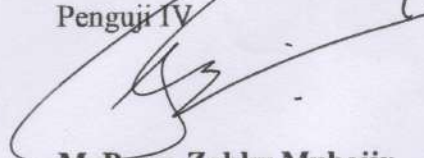
Penguji II



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir

Ridlwan, S.H., M.Kn.

NIP. 199205142025051001

Surabaya, 10 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fajar Nur Rimantoro
NIM : 05020421039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (Siyasah)
E-mail address : fajarlamongan100401@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2026

Penulis

(Fajar Nur Rimantoro)

ABSTRAK

Penegakan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten Lamongan dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan dengan berpedoman Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Akan tetapi, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan pengemis. Dari permasalahan tersebut memunculkan rumusan masalah yakni bagaimana efektivitas PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 dan bagaimana peran PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 menurut *siyāsah dusturiyāh*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris dengan melakukan observasi dan wawancara dengan PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan yang didukung data sekunder berupa buku atau jurnal terkait dengan PPNS Satpol PP. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data pada skripsi ini menggunakan analisis kualitatif dan model deduktif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah peran PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 belum sepenuhnya efektif karena setelah masa pandemi covid-19, PPNS Satpol PP mengedepankan penegakan secara non yustisial. Alasan PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan mengutamakan penegakan secara non yustisial adalah Pemkab Lamongan memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk memulihkan ekonominya, perintah Bupati untuk mengutamakan penegakan secara non yustisial, dan Pemkab Lamongan belum mempersiapkan tempat resmi untuk PKL berdagang. Dari perspektif *siyāsah dusturiyāh*, peran PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 sangat penting untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh masyarakat Lamongan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 yang dilakukan PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan belum efektif dan hampir sesuai dengan *siyāsah dusturiyāh*. Saran untuk PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan adalah PPNS Satpol PP lebih aktif lagi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di daerah. Dengan penegakan hukum yang baik maka menghasilkan ketenteraman dan ketertiban umum yang didambakan masyarakat. Penegakan hukum yang baik bisa menaikkan kepercayaan aparat penegak hukum termasuk PPNS dihadapan masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori.....	18
H. Definisi Operasional.....	27
I. Metode Penelitian.....	30
BAB II TEORI <i>SIYÂSAH DUSTURIYÂH</i>, TEORI KEWENANGAN, DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	42
A. Teori <i>Siyâsah Dusturiyâh</i>	42
B. Teori Kewenangan.....	50
C. Teori Efektivitas Hukum.....	54

BAB III EFEKTIVITAS PPNS SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2007.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi	
Penelitian.....	59
B. Hasil PPNS Satpol PP dalam Menjalankan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007.....	70
C. Efektivitas dalam Menjaga Ketenteraman serta Ketertiban Umum yang Dilakukan oleh PPNS Satpol PP Sesuai dengan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007.....	73
D. Hambatan PPNS Satpol PP dalam Penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007.....	91
E. Upaya PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan dalam Mempertahankan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	94
F. Analisa Penulis.....	96
BAB IV PERAN PPNS SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 MENURUT SIYÂSAH DUSTURIYÂH.....	101
A. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 dari Sudut Pandang <i>Siyâsah Dusturiyâh</i>	101
B. Kewenangan PPNS Satpol PP dalam Menegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 dari Perspektif <i>Siyâsah Dusturiyâh</i>	105
C. Kewenangan PPNS Satpol PP dari Perspektif <i>Wilāyah al-Hisbah</i>	115
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	128
BIOGRAFI PENULIS.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Daftar PPNS yang Ada di Satpol PP Kabupaten Lamongan	69
Tabel 3.2 Jumlah Kegiatan Operasi Penertiban	71
Tabel 3.3 Jumlah Pelanggar dari Operasi Penertiban	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Lamongan	63
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Lamongan	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu, dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1981.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- _____. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Syar'iiyyah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Efrinaldi. *Fiqh Siyasah: Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Granada Press, 2007.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat"*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Husain, Sarkawi B., Purnawan Basundoro, Gayung Kasuma, Ikhsan Rosyid, Adrian Perkasa, Muryadi, Adi Setijowati, Shinta Devi, dan Ahmad Ryan Pratama. *Sejarah Lamongan Dari Masa Ke Masa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- _____. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- _____. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- _____. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Mustofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

- Songgono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998.
- Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wardiah, Mia Lasmi. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Pusaka Setia, 2016.
- Winoto. *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Aliyah, Rahma Annisa, dan Satriana Fitri Mustika Sari. "Aplikasi Sistem Informasi Geografis pada Lokasi dan Pola Sebaran Bangunan Museum di Wilayah Gerbangkertosusila." *ViTeks* 1, no. 3 (2023): 64-71.
- Amer, Nabih, dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Syar'iyah dan Negara Hukum." *al-Mizan* 15 no. 2 (2019): 244-267.
- Armanda, Bagus. "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477-481.
- Burhan, Andi Ulil Amri, dan Gunadi. "Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022): 4199-4209.
- Dawali, Nadia Nurul Izmi. "Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum

- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” Magister, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Fahmi, Farhan Al’ Afif, Azharisman Rozie, dan Selamat Jalaludin. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar.” *Jurnal Tatapamong* 4, no. 1 (2022): 1-14.
- Gumansyah, Wery. “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123-134.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1-20.
- Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Havez. “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah.” *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95-116.
- Halim, Marah. “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam.” *Jurnal Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 65-81.
- Handhoko, Muhammad. “Implementasi *E-Court* di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Hermanto, Agus. “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali).” *al-Adalah* 14, no. 2 (2017): 433-460.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, dan Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115-134.
- Hutasuhut, Ulliynta Mona, Zuhraeni, Agus Hermanto, dan Triono. “Problematisa Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *as-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135-151.

- Ismail, Habib, Dani Amran Hakim, dan Muhammad Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers Under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 151-174.
- Irvaniar, Mohammad Yuli, dan Lucky Dafira. "Problematika Pengesahan Peraturan Daerah di Jawa Timur (Study Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur)." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 155-162.
- Junaedi, Gatot Sambas. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Tatapamong* 4, no. 2 (2022): 102-112.
- Lasahido, Adibah Amintasria, Ermaya Suradinata, dan Sampara Lukman. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Renaissance* 6, no. 2 (2021): 829-843.
- Lasatu, Asri. "Urgensi Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Kinerja DPRD." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201-222.
- Lestari, Evi, dan Rian Destiningsih. "Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima." *Jurnal STEI Ekonomi* 29, no. 2 (2020): 78-87.
- Nabila, Alfi. "Analisis Pengelolaan Usaha Wingko Babat dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau dari Manajemen Syariah (Studi Kasus Usaha Wingko Babat Alwi Cap Dua Kelapa di Desa Gerdu Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)." Skripsi, IAIN Kediri, 2023.
- Nabila, Putri Eva. "Peran Satpol PP dan WH Kota Sabang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat." Skripsi, UIN ar-Raniry, 2020.
- Nasilah, Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri. "Implementasi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Kec. Babat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

- PA, Berani. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru." Tesis, Universitas Medan Area, 2023.
- Sadiyah, Halimatus, dan M. Taufiq. "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Kabupaten Lamongan." *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 55-66.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (2013).
- Sawitra, Arkian. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum." Skripsi, IAIN Batusangkar, 2022.
- Sayuti. "Konsep Wilayatul Hisbah menurut Imam al-Mawardi." *Siyasah wa Qanuniyah* 2, no. 1 (2024): 51-70.
- Situngkir, Daniel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8-14.
- Sormin, David Ahimza Morales, dan Heru Nurasa. "Internalisasi Budaya Organisasi dalam Penyelenggaraan Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon." *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 17, no. 1 (2025): 94-102.
- Susi, Anwar Hidayat, dan Muhamad Abas. "Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 317-327.
- Widada, Gumirlang Kelvin Reymonda. "Efektifitas Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023): 2684-2701.
- Widjaja, Gunawan. "Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata." *Jurnal Alwatzikhoebillah* 9, no. 2 (2023): 310-319.

Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-418.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Data Elektronik

“Deskripsi Singkat Lamongan.” Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, 12 September 2022, akses 20 Februari 2025, <https://bappelitbangda.lamongankab.go.id/posting/6299>.

“Kabupaten Lamongan.” BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 1 Januari 2025, akses 20 Februari 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-lamongan/>.

“Lapor Pak YES.” Pemerintah Kabupaten Lamongan, 7 November 2022, akses 4 Agustus 2025, <https://laporpakyes.lamongankab.go.id/>.

“Penduduk Kabupaten Lamongan.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 1 Januari 2023, akses 20 Februari 2025, <https://lamongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkjMg==/penduduk-kabupaten-lamongan.html>.

“Profil Kabupaten Lamongan.” Pemerintah Kabupaten Lamongan, 1 Januari 2025, akses 20 Februari 2025, <https://lamongankab.go.id/>.

“Struktur Organisasi.” Satpol PP Kabupaten Lamongan, 1 Januari 2025, akses 20 Februari 2025, <https://polpp.lamongankab.go.id/profil/struktur-organisasi>.

“Surah An-Nisa ayat 58.” Tafsir Web, akses 8 Juli 2025, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

Wawancara

Hatta. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Lamongan. *Wawancara*. Lamongan, 6 Agustus 2025.

Jarwito. PPNS/Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan. *Wawancara*. Lamongan, 4 Agustus 2025.

Pamungkas, Puput Wisnu. PPNS/Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Lamongan. *Wawancara*. Lamongan, 15 April 2025.

_____. PPNS/Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Lamongan. *Wawancara*. Lamongan, 4 Agustus 2025.

Setiawan, Eko Dedi. PPNS/Kepala Seksi Pengamanan Satpol PP Kabupaten Lamongan. *Wawancara*. Lamongan, 14 April 2025.

Suparjono. PPNS/Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kabupaten Lamongan. *Wawancara*. Lamongan, 14 April 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A